



Peran Pondok Pesantren dalam Penguatan *Civic Virtue* Santri di Era Transformasi Digital

Ahmad Muwafiq

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam Sumenep, Indonesia

Email: ahmadmuwafiqmadura@gmail.com

Article History

Received : August 9th 2026

Revision : September 13th 2026

Publication : October 16th 2026

Abstract

This study was conducted as a preventive response to various negative issues currently associated with Islamic educational institutions, particularly pesantren (Islamic boarding schools). These issues range from allegations that pesantren serve as breeding grounds for radicalism to concerns regarding violence manifested through bullying and other forms of deviant behavior. This research employed a qualitative case study approach to provide an in-depth, contextual, and holistic understanding of the complex social phenomena occurring within pesantren. The findings reveal that the formation of civic virtue in pesantren is implemented through various educational practices, including fostering multicultural understanding, cultivating positive attitudes, promoting ethical social interactions, teaching respect for religious scholars, developing courtesy toward elders and knowledgeable individuals, strengthening religious faith, and nurturing unity, solidarity, and strong familial bonds among students. These values are reflected across the dimensions of civic knowledge, civic disposition, and civic skills. The study demonstrates that pesantren function as essential moral institutions that contribute significantly to the character development of the younger generation. Furthermore, pesantren play a strategic role in mediating educational processes by integrating religious knowledge with general education and digital literacy, thereby preparing students to become responsible digital citizens in the era of digital transformation.

Keywords: *Islamic Boarding School, Civic Virtue, Digital Citizenship.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan sebagai respons preventif atas beberapa isu miring terkait lembaga pendidikan keagamaan, khususnya Pesantren yang marak terjadi saat ini. Mulai dari tuduhan bahwa pesantren merupakan rahim yang melahirkan radikalisme hingga darurat kekerasan yang ditampilkan melalui perilaku menyimpang seperti perundungan dan tindak kekerasan lainnya. Metode penelitian *case study* digunakan pada penelitian ini guna memberikan pemahaman mendalam, kontekstual, dan holistik mengenai fenomena sosial yang kompleks. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pembentukan *civic virtue* di pesantren mulai dari memahami multikulturalisme, membentuk sikap yang baik, etika bergaul, cara menghargai seorang ulama, pembentukan sikap santun kepada orang yang lebih tua, pintar, memperkuat keimanan, menggalang persatuan, kebersamaan dan kekeluargaan yang erat, dan lain sebagainya tercermin dalam setiap bagian pada *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skill*. Intinya, pesantren di sini merupakan salah satu lembaga pengendali moral bagi generasi bangsa. Selain itu, pesantren juga menjadi mediator dalam pendidikan



untuk mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum bahkan literasi digital yang dapat membentuk para santri siap menjadi warga dengan keterampilan digital (*digital citizenship*).

Kata Kunci: Pondok Pesantren, *Civic Virtue*, Kewarganegaraan Digital.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pengembangan kesadaran sosial dan kebangsaan peserta didik. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan agama, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkontribusi dalam membangun moralitas, solidaritas, dan tanggung jawab kemasyarakatan. Azra (2012) menjelaskan bahwa pesantren memiliki kemampuan untuk mempertahankan tradisi keislaman sekaligus beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Melalui sistem pendidikan yang menekankan keteladanan, pembiasaan, dan pengajaran kitab-kitab klasik, pesantren turut berperan dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat (Zainuddin, 2022). Dengan demikian, pesantren memiliki kedudukan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan, tetapi juga kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Meskipun memiliki kontribusi historis dalam pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pesantren tidak terlepas dari berbagai stigma negatif, terutama yang berkaitan dengan radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Munculnya tindakan radikal yang mengatasnamakan agama telah mendorong berkembangnya pandangan yang menghubungkan lembaga pendidikan Islam dengan penyebaran ideologi ekstrem. Wahid (2009) mengkritik kecenderungan kelompok Islam garis keras yang berupaya menjadikan agama sebagai ideologi politik eksklusif dan mengklaim bahwa pemahaman mereka merupakan satu-satunya interpretasi yang benar terhadap ajaran Islam. Namun, generalisasi yang mengaitkan pesantren dengan radikalisme perlu dipandang secara kritis karena tidak mencerminkan keseluruhan karakter, orientasi, dan praktik pendidikan pesantren. Dalam konteks ini, Hidayat (2021) menempatkan pesantren sebagai institusi yang memiliki peran dalam penguatan nilai moderasi beragama dan upaya deradikalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih proporsional terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan sikap toleran, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kontribusi pesantren terhadap pembentukan karakter kebangsaan dapat dipahami melalui konsep *civic virtue*, yaitu nilai-nilai kebajikan kewargaan yang mencerminkan kesadaran, sikap, dan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan,



Branson (1998) mengemukakan tiga komponen utama kompetensi kewargaan, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewargaan), *civic skills* (keterampilan kewargaan), dan *civic disposition* (watak kewargaan). Ketiga komponen tersebut memberikan landasan konseptual untuk memahami pembentukan karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam lingkungan pesantren, penguatan nilai-nilai tersebut dapat berlangsung melalui pendidikan agama, keteladanan kiai dan ustaz, pembiasaan kehidupan kolektif, serta kegiatan sosial yang menekankan kedisiplinan, penghormatan terhadap sesama, musyawarah, toleransi, dan solidaritas. Dengan demikian, tradisi pendidikan pesantren memiliki relevansi dengan pengembangan kebijakan kewargaan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun demikian, idealitas pesantren sebagai lembaga pembentukan moral menghadapi tantangan serius ketika sejumlah kasus kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Persoalan perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual terhadap peserta didik menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak, pengawasan kelembagaan, dan pembinaan karakter dalam lingkungan pendidikan berasrama. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam publikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024) yang dicantumkan dalam daftar pustaka penelitian ini. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian publik adalah penganiayaan terhadap santri di sebuah pondok pesantren di Kediri pada tahun 2024, sebagaimana diberitakan oleh Syifa (2024). Selain itu, Prasetyo (2022) mengangkat persoalan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan keagamaan berasrama melalui pendekatan viktimologi. Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan nilai-nilai keagamaan dalam suatu institusi pendidikan perlu disertai mekanisme pengawasan, perlindungan peserta didik, dan penerapan nilai moral secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Munculnya kasus-kasus kekerasan dalam lembaga pendidikan Islam juga menimbulkan persoalan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi pendidikan keagamaan dalam menjamin keamanan dan membentuk karakter peserta didik. Ahmad dan Nurhayati (2023) membahas persoalan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam dalam kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak cukup dilaksanakan melalui penyampaian pengetahuan normatif, tetapi perlu diwujudkan melalui praktik pendidikan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Dalam perspektif *civic virtue*, nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari pembentukan watak kewargaan yang harus tercermin dalam interaksi antarsantri maupun hubungan antara santri dan pengelola pesantren. Oleh sebab itu, penguatan *civic virtue* menjadi relevan



sebagai salah satu pendekatan pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya lingkungan pesantren yang aman, inklusif, dan berkeadaban.

Selain menghadapi tantangan internal, pesantren juga dihadapkan pada perubahan sosial yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital telah memengaruhi cara individu memperoleh pengetahuan, berkomunikasi, membangun hubungan sosial, dan mengekspresikan pandangan keagamaan. Munir (2021) membahas digitalisasi pesantren sebagai perkembangan yang membuka peluang pengembangan keilmuan sekaligus menghadirkan tantangan terhadap pembinaan moral santri. Sementara itu, Rahmawati (2022) mengkaji polarisasi keagamaan di media sosial sebagai salah satu tantangan bagi generasi muda Muslim. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi digital perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara bertanggung jawab, serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Tanpa penguatan literasi digital dan landasan moral yang memadai, penggunaan teknologi berpotensi memperbesar risiko penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, intoleransi, dan perilaku komunikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadaban.

Dalam konteks tersebut, penguatan *civic virtue* di lingkungan pesantren perlu dikembangkan agar tidak terbatas pada hubungan sosial secara langsung, tetapi juga mencakup perilaku kewargaan dalam ruang digital. Konsep *digital citizenship* menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara etis, kritis, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Pratama dan Wijaya (2023) membahas etika pengguna media sosial Muslim dalam kerangka kewargaan digital, sedangkan Fitriani dan Handoyo (2023) mengangkat transformasi *civic virtue* menuju *digital citizenship* dalam lingkungan pendidikan tradisional. Dalam konteks pendidikan pesantren, penguatan kewargaan digital dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman, seperti *tabayyun* dalam memverifikasi informasi, *ukhuwah* dalam membangun hubungan sosial, serta *akhlakul karimah* dalam menjaga kesantunan berkomunikasi. Integrasi tersebut dapat diarahkan pada pengembangan pengetahuan, watak, dan keterampilan kewargaan sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan Branson (1998). Dengan demikian, penguatan *civic virtue* memiliki relevansi terhadap pembentukan santri yang mampu berpartisipasi secara positif, baik dalam kehidupan sosial secara langsung maupun dalam ruang digital.

Berdasarkan konteks tersebut, Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai kebajikan kewargaan diinternalisasikan dalam sistem pendidikan pesantren di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital. Penelitian ini diarahkan untuk memahami praktik pembentukan karakter melalui kegiatan pembelajaran keagamaan, pembiasaan kehidupan sosial, keteladanan pengasuh, serta aktivitas organisasi dan pendidikan yang melibatkan santri. Selain itu, penelitian juga menelaah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berkaitan



dengan pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewargaan santri. Pemilihan lokasi tersebut memungkinkan penelitian dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan karakteristik kelembagaan, tradisi pendidikan, dan dinamika interaksi sosial yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pendidikan karakter, moderasi beragama, dan kewargaan digital. Hidayat (2021) membahas peran pesantren dalam penguatan moderasi beragama dan deradikalisasi, sedangkan Zainuddin (2022) mengkaji internalisasi nilai karakter berbasis kitab kuning dalam pendidikan tradisional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Lestari (2022) menyoroti pembentukan karakter kebangsaan melalui pembelajaran kewarganegaraan pascapandemi. Sementara itu, Pratama dan Wijaya (2023) mengkaji etika kewargaan digital, serta Fitriani dan Handoyo (2023) membahas transformasi nilai *civic virtue* menuju *digital citizenship* dalam lingkungan pendidikan tradisional. Kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap pembentukan karakter dan adaptasi nilai kewargaan dalam menghadapi perkembangan masyarakat kontemporer. Namun, berdasarkan literatur yang digunakan dalam penelitian ini, masih diperlukan kajian empiris yang secara khusus menghubungkan proses internalisasi *civic virtue*, pembentukan budaya sosial yang mendukung pencegahan perilaku kekerasan, serta pengembangan kompetensi kewargaan digital dalam konteks kehidupan pesantren.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka dalam memperkuat *civic virtue* santri melalui dimensi *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills* di era transformasi digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami praktik pendidikan, pembiasaan nilai, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pembentukan karakter kewargaan santri. Kebaruan yang diupayakan dalam penelitian ini terletak pada pengkajian secara terpadu antara nilai-nilai kewargaan yang berkembang dalam tradisi pendidikan pesantren, kebutuhan penguatan budaya sosial yang aman dan berkeadaban, serta tuntutan kompetensi kewargaan digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pendidikan karakter dan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan Islam, sedangkan secara praktis hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pesantren dalam mengembangkan pendidikan karakter yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan tantangan transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara mendalam, kontekstual, dan holistik mengenai fenomena sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok



terhadap suatu fenomena sosial (Creswell & Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka mempertahankan eksistensi kelembagaannya sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan kewargaan (*civic virtue*) kepada para santri di tengah perkembangan teknologi digital. Melalui desain studi kasus, penelitian diarahkan untuk mengeksplorasi secara intensif praktik pendidikan, interaksi sosial, program kelembagaan, tantangan, serta strategi yang diterapkan pesantren dalam membentuk karakter kewargaan santri.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat memanfaatkan berbagai sumber data untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2020). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung terhadap aktivitas, interaksi sosial, serta perilaku kewargaan santri, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka, meliputi profil kelembagaan, kurikulum kepesantrenan, tata tertib, arsip digital, publikasi media sosial resmi pesantren, serta literatur ilmiah terdahulu yang relevan dengan konsep *civic virtue* dan kewargaan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, serta studi dokumentasi dan digital. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai proses internalisasi nilai-nilai kebajikan kewargaan, praktik pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi digital dalam lingkungan pesantren. Wawancara dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan terhadap fenomena yang diteliti (Merriam & Tisdell, 2016). Selanjutnya, observasi partisipatif pasif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas keseharian santri dan praktik pendidikan di lingkungan pesantren tanpa terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati. Teknik observasi ini digunakan untuk memahami perilaku sosial, pola interaksi, dan pembiasaan nilai-nilai karakter dalam situasi alamiah (Moleong, 2018). Adapun studi dokumentasi dan digital dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kelembagaan serta aktivitas dan publikasi digital yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan sumber digital dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami bentuk komunikasi, interaksi, dan praktik sosial yang berlangsung melalui media berbasis teknologi (Salmons, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengacu pada model analisis kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion*



drawing/verification) (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah dikondensasi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan temuan penelitian. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan menafsirkan temuan serta menelaah kembali kesesuaiannya dengan data empiris yang diperoleh. Untuk mendukung keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut sejalan dengan prinsip pemeriksaan kredibilitas dalam penelitian naturalistik (Lincoln & Guba, 1985).

Kerangka analisis penelitian didasarkan pada tiga dimensi kompetensi kewargaan, yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills* (Branson, 1998). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pembentukan nilai-nilai kebajikan kewargaan santri dalam lingkungan Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka. Dimensi *civic knowledge* diarahkan pada pemahaman santri mengenai nilai-nilai kewargaan, etika sosial, serta literasi digital. Dimensi *civic disposition* mencakup pembentukan sikap, kesantunan, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun ruang digital. Sementara itu, dimensi *civic skills* berhubungan dengan kemampuan santri dalam menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai kewargaan melalui komunikasi, partisipasi sosial, serta pemanfaatan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Operasionalisasi ketiga dimensi tersebut disajikan dalam matriks berikut.

Tabel 1. Matriks Konseptualisasi Pembentukan Civic Virtue Santri

Dimensi Civic Virtue	Indikator Karakter Santri	Metode Analisis/Sumber Data
Civic Knowledge (Pengetahuan Kewargaan)	Pemahaman fikih muamalah digital, etika komunikasi Islam (tabayyun), dan literasi digital.	Analisis isi terhadap dokumen dan kurikulum pesantren.
Civic Disposition (Watak Kewargaan)	Kesantunan digital (akhlakul karimah), toleransi beragama dalam ruang digital, dan kemampuan menyikapi informasi hoaks.	Analisis naratif dan tematik terhadap hasil wawancara.
Civic Skills (Keterampilan Kewargaan)	Kemampuan memproduksi konten dakwah yang damai serta menyampaikan nilai-nilai kebangsaan melalui media digital.	Analisis hasil observasi terhadap aktivitas digital santri.

Sumber: Diadaptasi dari kerangka kompetensi kewargaan (Branson, 1998) dan dikembangkan sesuai fokus penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN*****Dinamika Kelembagaan dan Praktik Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Nurul Islam***

Pondok Pesantren Nurul Islam didirikan di Desa Karangcempaka oleh KH. Sirajuddin bin H. Syarkawi. Pola pertumbuhan lembaga ini berawal dari gerakan dakwah berbentuk pengajian-pengajian kecil berskala lokal. Pada dekade 1980-an, terjadi peningkatan kesadaran pendidikan keagamaan pada masyarakat Karangcempaka, yang berpusat pada sebuah langgar (musholla). Intensitas interaksi yang tinggi antara kiai dan pencari ilmu melahirkan kebutuhan wadah permanen. Transformasi institusional kemudian diperkuat melalui penyerahan tanah wakaf serta kontribusi swadaya material masyarakat guna membangun infrastruktur fisik, yang meliputi gedung asrama dan ruang kelas formal secara mandiri.

Pada aspek manajemen kepemimpinan, setelah melewati fase rintisan awal oleh KH. Sirajuddin, kepengurusan diteruskan oleh jajaran generasi penerus dengan mengadopsi pembaruan tata kelola administratif organisasi (modernisasi manajerial), namun tetap mempertahankan prinsip nilai-nilai dasar kepesantrenan.

Struktur kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Islam merupakan integrasi antara kajian teks keagamaan klasik (kitab kuning/turats) dan sistem kurikulum pendidikan formal nasional. Seluruh aktivitas santri dalam ekosistem ini dikelompokkan ke dalam jadwal terstruktur yang bersifat wajib dan disiplin.

Berikut merupakan rincian jadwal dan klasifikasi ragam aktivitas santri secara harian, mingguan, dan bulanan di Pondok Pesantren Nurul Islam:

Klasifikasi Waktu	Jenis Kegiatan Santri	Dimensi Pengembangan Karakter
Harian	Shalat berjamaah, pengajian kitab kuning, dan kegiatan sekolah formal nasional.	Kedisiplinan ritual, penguasaan literasi turats, dan kognitif formal nasional.
Mingguan	Latihan khitabah (pidato), pembacaan shalawat bersama, dan forum nalar Bahtsul Masa'il.	Keterampilan komunikasi publik, penumbuhan nalar kritis, dan resolusi masalah kontekstual.
Bulanan	Jam'iyah Sughro, Jam'iyah Kubro, dan Khotmil Qur'an.	Pengikatan ukhuwah (kohesi sosial) lintas daerah asal santri dan konsolidasi spiritual.

Komposisi santri di Pondok Pesantren Nurul Islam memiliki karakteristik heterogen. Data menunjukkan bahwa asal wilayah santri meluas dari daerah Kabupaten Sumenep sendiri hingga mencakup berbagai pulau di kawasan Jawa-Kalimantan. Keberagaman kultural ini membentuk ruang komunal inklusif tempat santri berinteraksi lintas budaya.

Di luar lingkungan internal fisik pesantren, terdapat wadah organisasi eksternal bernama Ikatan Keluarga Santri Alumni Nurul Islam (IKSANI). Struktur IKSANI mengorganisasi para alumni dan santri aktif untuk menjalankan fungsi



keagenan sosial di masyarakat masing-masing dengan membawa dasar karakter yang dibentuk di lingkungan masyarakat terutama di Karang Cempaka.

Pada awal abad ke-21, Pondok Pesantren Nurul Islam memasukkan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam dua bidang operasional, yaitu tata kelola administrasi kelembagaan dan media pendukung pembelajaran formal serta dakwah. Kebijakan ini ditujukan untuk penyebaran ajaran Islam yang moderat (wasathiyah) dengan panduan kaidah normatif: "Al-muhafazhatsu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah" (Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik) demi mewujudkan visi institusi sebagai pusat keunggulan (center of excellence).

Analisis Penguatan Civic Virtue dan Kewargaan Digital Santri di Era Transformasi Digital

Temuan data empiris mengenai transisi Pondok Pesantren Nurul Islam dari sebuah langgar kecil menjadi lembaga formal modern menegaskan pola linier perkembangan institusi keagamaan di Indonesia. Pola evolutif dari skala kecil (majelis pengajian) menuju struktur makro berskala besar ini mengonfirmasi tesis historis mengenai kekuatan adaptasi internal pesantren yang bersandar pada kelenturan sosiologis institusi tersebut dalam merespons tuntutan zaman (Azra, 2012). Pola pertumbuhan Nurul Islam mereplikasi secara tepat lintasan historis pesantren besar di tanah Jawa, seperti Tebuireng hingga Gontor.

Secara sosiologis, stabilitas estafet kepemimpinan dari KH. Sirajuddin kepada generasi penerus menunjukkan berjalannya proses rutinisasi karisma sebagaimana dijelaskan dalam teori otoritas (Weber, 1947). Karisma individual sang pendiri ditransformasikan secara mulus ke dalam otoritas rasional-legal yang diwujudkan melalui bentuk modernisasi manajerial, tanpa mendegradasi nilai kemandirian serta spiritualitas orisinal pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf.

Pemberlakuan integrasi kurikulum salaf dan pendidikan nasional di Nurul Islam menciptakan integrasi empiris yang menjawab kerangka konsep kebajikan warga negara (*civic virtue*) dalam pendidikan kewarganegaraan (Branson, 1998). Karakter kebajikan warga negara yang dibentuk dalam ekosistem ini terdiferensiasi ke dalam tiga dimensi esensial:

Civic Knowledge: Pengetahuan kewargaan yang luas terbentuk melalui perpaduan ilmu agama ukhrawi dan materi kurikulum nasional resmi, memberikan pemahaman santri atas status hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Civic Disposition: Watak kewargaan terbentuk melalui interaksi dengan realitas demografis santri yang heterogen (Nusantara). Pengkondisian kehidupan komunal ini menanamkan watak toleransi, keterbukaan, serta kecintaan terhadap keragaman kebudayaan nasional.



Civic Skills: Keterampilan berwarga negara diuji langsung melalui forum kritis Bahtsul Masa'il dan latihan khitabah, di mana nalar analitis serta kapasitas artikulasi gagasan publik santri dikembangkan secara teratur.

Di tengah disrupsi abad ke-21, implementasi digitalisasi administrasi dan media dakwah di Nurul Islam membuktikan perluasan peran kebajikan tersebut ke ranah siber (*digital civic virtue*). Adaptasi perangkat teknologi informasi ini menempatkan literasi digital bukan sebagai ancaman degradasi moral, melainkan instrumen amplifikasi perluasan dakwah Islam yang moderat (*wasathiyah*). Langkah strategis tersebut selaras dengan pemikiran mengenai peran sentral kiai selaku agen penyaring nilai luar (*cultural broker*) yang secara selektif memilah elemen luar berlandaskan nilai masalah kemaslahatan umum (Geertz, 1960).

Analisis komparatif menunjukkan bahwa temuan penelitian ini sangat konsisten dengan kajian terdahulu yang memposisikan institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia sebagai pilar penguat masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis dan berwawasan kebangsaan (Hasan, 2006; Dhume, 2010). Namun demikian, penelitian ini memberikan nuansa teoretis baru (*novelty*) yang melengkapi studi pascastrukturalis seperti pendekatan institusi total yang cenderung mengecap lingkungan sosiologis pesantren sebagai ruang terisolasi, ortodoks, dan anti-modernitas (Goffman, 1961). Kasus Nurul Islam membuktikan bahwa tradisi salaf yang berbasis kepatuhan total, ketaatan spiritual, mampu melahirkan agensi kewargaan yang dinamis dan kompetitif di ruang digital global melalui artikulasi operasional kaidah "Al-muhafazhatu 'alal qadimis shalih..."

Kontribusi ilmiah teoretis utama dari penelitian ini terletak pada formulasi model Kewargaan Digital (*Digital Citizenship*). Model ini menawarkan visualisasi konseptual baru mengenai proses internalisasi karakter kebangsaan sekuler universal yang dapat diekstrak secara efektif dari sumber teologis tradisionalitas keagamaan (kitab kuning). Institusi pesantren terbukti tidak sekadar menjadi agen reproduksi teks keagamaan masa lampau, melainkan berfungsi sebagai inkubator pembentukan etika komunikasi siber (anti-hoaks, tabayyun, dan kesantunan digital).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka memiliki peran penting dalam penguatan *civic virtue* santri melalui integrasi pendidikan keagamaan, pembiasaan nilai-nilai sosial, dan kegiatan kelembagaan yang terstruktur. Pembentukan karakter kewargaan tersebut tercermin dalam tiga dimensi utama, yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills*. Dimensi *civic knowledge* dikembangkan melalui integrasi pembelajaran kitab kuning dan pendidikan formal yang memperkuat pemahaman santri mengenai nilai-nilai agama, sosial, serta tanggung jawab kewargaan. Dimensi *civic disposition* diwujudkan melalui pembiasaan sikap toleransi, kesantunan, kedisiplinan, penghormatan terhadap sesama, dan solidaritas dalam kehidupan pesantren yang memiliki latar belakang santri beragam. Sementara itu, dimensi



civic skills dikembangkan melalui kegiatan *khitabah*, *Bahtsul Masa'il*, dan organisasi sosial yang mendorong kemampuan komunikasi, berpikir kritis, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan kebajikan kewargaan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Dalam menghadapi era transformasi digital, Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka menunjukkan upaya adaptasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kelembagaan, pembelajaran, dan penyebaran dakwah Islam yang moderat. Adaptasi tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai tradisional pesantren dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Penguatan *civic virtue* dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pembentukan karakter santri dalam kehidupan sosial secara langsung, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kesadaran dan tanggung jawab kewargaan di ruang digital (*digital citizenship*). Nilai-nilai keislaman, seperti *tabayyun*, *akhlakul karimah*, toleransi, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan penting dalam membangun etika komunikasi serta penggunaan teknologi secara bijaksana. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan karakter kewargaan, tradisi kepesantrenan, dan literasi digital sebagai arah pengembangan pendidikan pesantren yang adaptif terhadap perubahan sosial. Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan santri yang memiliki pemahaman keagamaan, kepekaan sosial, serta kemampuan berpartisipasi secara positif dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Nurhayati, E. (2023). Krisis kepercayaan publik pada lembaga pendidikan Islam pasca-maraknya kasus kekerasan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(2), 201–215.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium baru*. Kencana.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education: A report of the task force on civic education*. Center for Civic Education.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dhume, S. (2010). *My friend the fanatic: Travels with a radical Islamist*. TarcherPerigee.
- Dokumen Historis Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka. (2024). *Buku profil tahunan*. Sekretariat Pesantren.
- Fitriani, S., & Handoyo, T. (2023). Transformasi civic virtue menjadi digital citizenship di lingkungan pendidikan tradisional. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 178–190.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Free Press.
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Aldine Publishing Company.



- Hasan, N. (2006). *Islamist public sphere in Indonesia: Islam, freedom and democracy*. PusAm.
- Hidayat, R. (2021). Pesantren dan deradikalisasi: Konstruksi nilai moderasi di era pasca-kebenaran. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(3), 310–325.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Laporan tahunan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Data kasus pelanggaran hak anak di satuan pendidikan keagamaan tahun 2021–2023. *Jurnal Data KPAI*, 4(2), 40–55.
- Lestari, P. (2022). Pembelajaran kewarganegaraan pasca-pandemi dalam membentuk karakter kebangsaan siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 140–152.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2021). Digitalisasi pesantren: Antara peluang pengembangan keilmuan dan ancaman degradasi moral santri. *Jurnal Pendidikan Islam SINTA*, 9(2), 115–130.
- Prasetyo, B. (2022). Analisis viktimologi kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan keagamaan berasrama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 85–102.
- Pratama, A., & Wijaya, H. (2023). Etika netizen Muslim dalam bingkai kewargaan digital kontemporer. *Jurnal Media dan Kebudayaan*, 8(4), 218–235.
- Rahmawati, A. (2022). Polarisasi keagamaan di media sosial dan tantangan generasi muda Muslim. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 34–52.
- Salmons, J. (2016). *Doing qualitative research online*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Syifa, M. (2024, 28 Februari). Tragedi penganiayaan santri di Kediri: Evaluasi sistem pengawasan pondok pesantren. *Kompas.com*.
- Wahid, A. (2009). *Ilusi negara Islam: Ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia*. Desantara Utama.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). Free Press.
- Zainuddin, M. (2022). Internalisasi nilai karakter berbasis kitab kuning di lembaga pendidikan tradisional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45–59.